

Dampak Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Laju Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Sobel Test

Galih Wisnu Wardhana¹, Yenni Khristiana²

¹Fakultas Ilmu Komputer, ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dharma AUB Surakarta

Email: ¹gwisnu1@gmail.com, ²yenni.kristi@stie-aub.ac.id

Abstrak

Kemiskinan dapat diakibatkan oleh beberapa keadaan, termasuk kondisi ekonomi dan lingkungan yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam, kekurangan manusia dan sumber daya lain yang membuat produksi relatif rendah dan tidak mampu memberikan kontribusi untuk pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh indeks pertumbuhan manusia (ipm), pengangguran, terhadap kemiskinan di Indonesia, serta konsumsi energi sebagai variabel mediasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 provinsi. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 38 provinsi di Indonesia. Hasil uji mediasi dengan uji Sobel menemukan bahwa tidak ada efek mediasi dari konsumsi listrik di hubungan antara indeks pembangunan manusia dan pengangguran. Artinya konsumsi listrik kurang mampu menjembatani indeks pertumbuhan manusia dan pengangguran di Indonesia.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Laju Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Uji Sobel

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan. Penduduk berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat dari pembangunan manusia yang melebihi produksi produk, menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Sumber daya bumi tidak dapat mengimbangi kebutuhan populasi yang terus bertambah, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya alam yang digunakan sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia yang bersifat terbatas, hal ini mendorong manusia untuk mendekati garis kemiskinan karena persaingan yang cukup ketat dalam memenuhi kebutuhan hal ini dikemukakan oleh Teori Malthus dalam Skuosen (2009:85) (agustina, Syechalad, & Hamzah, 2018).

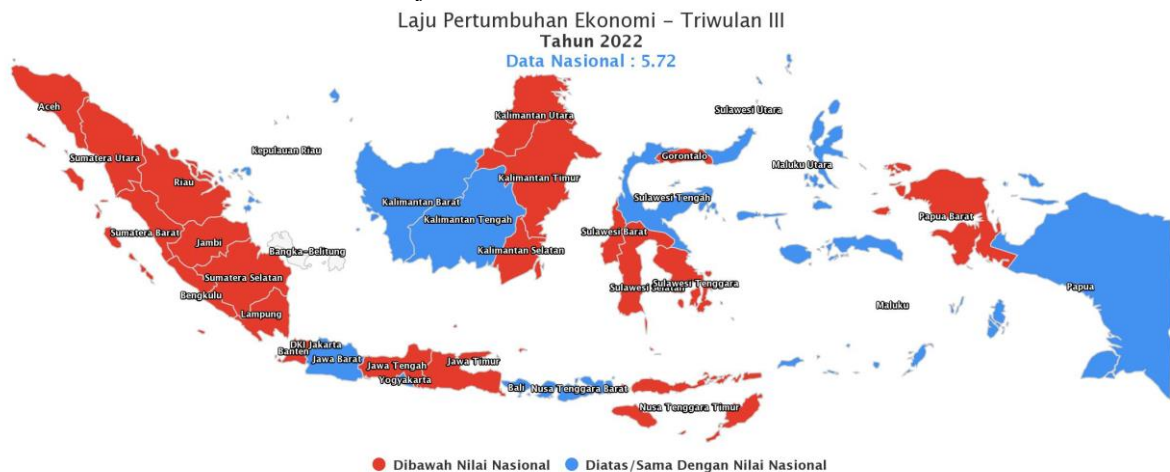
Tabel 1.1
Data Distribusi Penduduk Indonesia Berdasarkan Wilayah Tahun 2020

Wilayah	Persentase Penduduk Indonesia
Pulau Jawa	56,10%
Pulau Sumatera	21,68%
Pulau Sulawesi	7,36%
Pulau Kalimantan	6,15%
Bali Dan Nusa Tenggara	5,54%
Maluku Dan Papua	3,17%

Sumber: <https://www.kompas.com>

Pembangunan adalah tujuan dari suatu negara, dimana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada pembangunannya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada (Rustam 2010). Selain pertumbuhan ekonomi salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi adalah seberapa besar efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia (Yacoub 2012). Kemiskinan sendiri pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al. 2016). Laju pertumbuhan ekonomi Di Indonesia saat ini bisa dilihat dari Gambar 1.1, terlihat masih banyaknya provinsi di Indonesia yang masih dibawah nilai nasional oleh karena itu dapat menjadi acuan pemerintah untuk dapat menangani kemiskinan di Indonesia untuk saat ini.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III Tahun 2022



Sumber: simreg.bapenas.go.id

Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dirasa masih kurang efektif dalam menangani masalah kemiskinan yang ada. Hal tersebut terlihat dalam laporan BPS pada bulan september 2016 bahwa presentase penduduk miskin perkotaan turun dari 7,79% menjadi 7,73% sementara pada daerah perdesaan turun dari 14,11% menjadi 13,96%. Namun meskipun demikian jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0.15 juta orang. Selain itu masih adanya provinsi yang memiliki presentase kemiskinan diatas presentase nasional. Hal tersebut menandakan bahwa masih adanya angka kemiskinan yang tinggi yang terjadi pada daerah provinsi yang ada di Indonesia.

Menurut data dalam www.merdeka.com Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dihadapkan dengan masalah kemiskinan. BAPPENAS (2004) mendefinisikan Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak –hak dasarnya untuk memepertahankan serta mengembangkan kehidupan yang bermartabat (repository.uir.ac.id) Kemiskinan adalah masalah umum yang telah berlangsung lama tanpa ditemukan solusi yang tepat. Besarnya kemiskinan di suatu negara atau daerah merupakan cerminan langsung dari tingginya tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh warga negaranya. Masalah kemiskinan di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja karena tampaknya tidak kunjung menurun.

Kemiskinan dapat diakibatkan oleh beberapa keadaan ,termasuk kondisi ekonomi dan lingkungan yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam,kekurangan manusia dan sumber daya lainya yang membuat produksi relatif rendah dan tidak mampu memberikan kontribusi untuk pengentasan kemiskinan. Pembangunan yang tidak merata biasanya disebabkan oleh kondisi struktural dan sosial,diikuti oleh kondisi budaya yang dibawa oleh perilaku seseorang yang memuat mereka merasa cukup dan membuat mereka tetap berada dilingkaran kemiskinan (dj.kemenkeu.go.id). Jika dilihat dari segi ekonomi ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan ,yaitu rendahnya pendapatan ,keterbatasan lapangan pekerjaan,rendahnya pertumbuhan ekonomi ,rendahnya tingkat pendidikan ,rendahnya indeks pembangunan manusia serta meningkatnya jumlah inflasi (www.jimfeb.ub.ac) .

Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut (Christianto, 2013). Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian. Pratama (2014) mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun, masih mengalami masalah kemiskinana sebesar 24% jika angka kemiskinan di bawah 1\$US dari 240 juta jiwa. Namun, jika angka kemiskinan menggunakan standart hidup dibawah 2\$ maka angka kemiskinan tersebut melonjak menjadi 35%.

Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Maret 2022

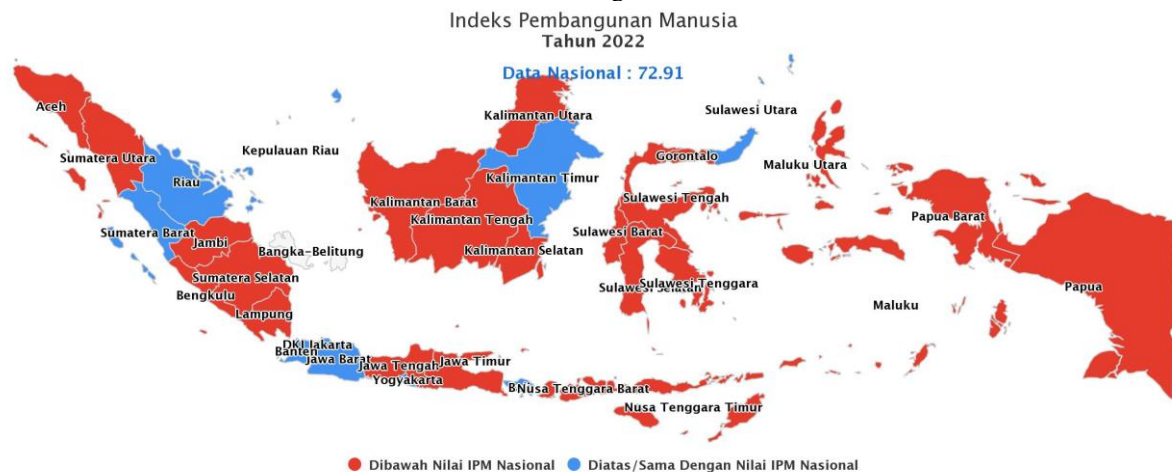


Sumber: simreg.bapenas.go.id

Meskipun garis kemiskinan meningkat seiring meningkatnya ancaman ekonomi, kemiskinan di Indonesia semakin menurun. Strategi pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama dengan cara melindungi suatu kelompok atau keluarga yang mengalami kemiskinan sementara, kemudian yang kedua yaitu dengan cara membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan cara memberdayakan serta mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi pemerintah tersebut dipraktikkan kedalam 3 program yaitu (1) penyediaan kebutuhan bahan pokok (2) pengembangan system jaminan sosial (3) pengembangan budaya usaha (djpb.kemenkeu.go.id). Adapun beberapa program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yaitu ada Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan beberapa program bantuan pendidikan. Beberapa program pemerintah tersebut belum berjalan dengan optimal, dikarenakan banyaknya pihak pemerintah yang lebih mementingkan pembangunan di ibu kota yang notabnya tingkat kemiskinanya lebih mudah terlihat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukur capaian pembangunan manusia dengan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM sebagai ukuran kualitas hidup mencakup 3 dimensi. Dimensi tersebut antara lain yaitu mencakup tentang umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. Menurut (Mulyadi:2003) dengan adanya investasi pada setiap dimensi tersebut maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi juga kualitas orang tersebut, terutama dalam hal pekerjaan. Ketika kualitas pekerjaan seseorang bagus maka akan mendapatkan upah yang tinggi. Semakin Tinggi Indeks pembangunan Manusia (IPM) maka semakin rendah tingkat kemiskinanya (Izzah & Hendarti, 2021). Pada tahun 2019, inflasi yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,81% (yoy) lebih rendah 0,01 basis poin dibandingkan tahun 2018 yang tercatat di angka 2,82% (yoy). Dengan demikian pencapaian inflasi di Jateng juga jauh lebih baik dibandingkan inflasi tahun 2017 yang tercatat 3,71 persen. Dengan tingkat inflasi yang lebih rendah, menunjukkan perekonomian Jawa Tengah lebih efisien dan berdaya saing. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2021 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Pada 2020 pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,95 persen dibanding tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 72,16 tumbuh 0,40 persen (meningkat 0,29 poin). Pemetaan IPM di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022



Sumber: simreg.bapenas.go.id

Menurut Yanuar (2009) pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Pengangguran dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya keterampilan dan pengangguran menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik (Nanga, 2005 dalam Aristina, 2017) (Br Sembiring & Simanjuntak, 2021). Ketika tingkat pengangguran naik maka tingkat kemiskinan juga akan naik begitupula sebaliknya jika tingkat pengangguran turun maka tingkat kemiskinan juga akan turun. Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan masalah bagi suatu perekonomian daerah atau negara.

Fenomena makro ekonomi tersebut, seperti yang telah dijelaskan diatas menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam mengatasi masalah kemiskinan, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dari pembangunan ekonomi (Atalay 2015). Berbagai studi empiris yang telah ada menunjukkan bahwa harapan pembangunan ekonomi adalah untuk membawa perbaikan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, standart pendidikan yang lebih baik atau perbaikan kesehatan (Cremin & Nakabugo 2012).

Hall dan Midgley (2004:14) (agustina, Syechalad, & Hamzah, 2018) mendefinisikan kemiskinan adalah sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan individu yang lainnya dalam masyarakat. Menurut Suparlan (2004: 26) (agustina, Syechalad, & Hamzah, 2018) mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada pendekatan untuk memberikan pengertian tentang kemiskinan. Pendekatan pertama adalah pendekatan absolut yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik minimum yang harus dipenuhi seseorang atau keluarga agar dapat melangsungkan hidupnya pada taraf yang lebih layak. Pendekatan kedua adalah pendekatan relatif dimana kemiskinan ditentukan berdasarkan taraf hidup relatif dalam masyarakat.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan *Kemiskinan menengah* untuk pendapatan dibawah \$2 per hari, dengan batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari \$2/hari. "Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup

dibawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat menjadi kekuatan pendorong untuk menghasilkan kekayaan yang nantinya akan menetes kebawah untuk memberantas kemiskinan dan semua masalah yang menyertainya (Cremin & Nakabugo 2012). Pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Mendidik anak-anak miskin memiliki peluang yang tinggi untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan (World Bank). Salah satu indikator pendidikan dapat dilihat dari tingkat IPM. IPM merupakan indeks komprehensif sebagai ciri tingkat pembangunan manusia disuatu daerah atau negara yang diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan umur panjang, serta pendapatan (Yakunina RP & Bychkov GA 2015). IPM menurut BPS ada tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Secara umum IPM berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi IPM maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Sedangkan hubungan IPM dengan kondisi ekonomi pada umumnya juga berhubungan positif. Artinya semakin tinggi tingkat ekonomi maka semakin tinggi juga tingkat IPM. Konsep IPM pertama kali dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut pada setiap tahunnya. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia dapat diartikan sebagai “*a process of enlarging people's choice*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek yang dapat dilihat yaitu usia yang panjang dan hidup yang sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan 4 elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*) serta pemberdayaan (*empowerment*). (Dharmayukti, Rostinsulu, & Niode, 2021)

Pengangguran

Mankiw (2006:154) (dalam Khairil, 2018) mengatakan bahwa pengangguran merupakan permasalahan makro ekonomi yang mempengaruhi masyarakat secara langsung dan menjadi masalah yang paling berat. (Br Sembiring & Simanjuntak, 2021).

Menurut Sukirno (2000: 474) (dalam Khairil, 2018). Pengangguran ialah masyarakat yang sudah masuk kedalam usia produktif atau usia kerja dan tergolong sebagai angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan sedang mencari kerja. Pengangguran menurut Sri Hermuningsih dikutip dari Deni Tisna, “pengangguran di definisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja (labor force) untuk memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka butuhkan dan mereka inginkan”. (Br Sembiring & Simanjuntak, 2021)

Menurut BPS Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. (<https://www.bps.go.id/>)

Konsumsi Energi

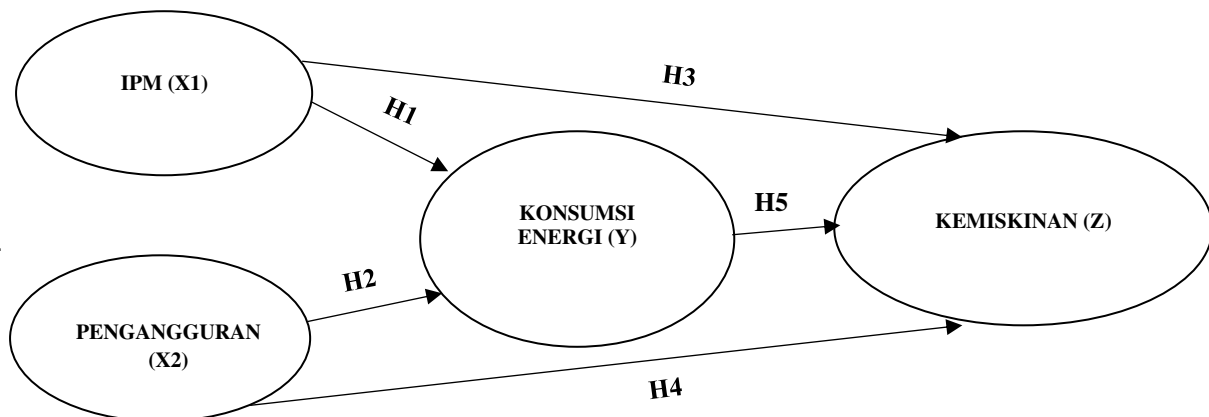
Subsidi Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary (1990) dalam penelitian (Chinyere & Ani Casimir 2013) subsidi adalah: “the money that is paid by a government or organization to reduce the cost of services or of producing goods so that their prices can be kept low”. Makna dari kalimat uang yang dibayarkan oleh pemerintah atau organisasi untuk mengurangi biaya layanan atau memproduksi barang sehingga harganya dapat tetap rendah. Subsidi pertama kali di implementasikan di Inggris pada masa kekuasaan Raja Charles II. Setelah itu subsidi baru berkembang pada abad 20 dan banyak program-program subsidi yang bisa memecahkan persoalan pemerintah terutama dalam anggaran keuangan. Subsidi menurut Todaro dan Smith (2003: 811) adalah ketika pemerintah melakukan sebuah pembayaran kepada produsen ataupun distributor yang berada pada sebuah industri dengan tujuan untuk menjaga kualitas kinerja dalam sebuah industri yang berkaitan agar tidak sampai terjadi penurunan. Rudi Handoko dan Pandu Patriadi telah mengutip buku yang berjudul *Contemporary Economics* yang ditulis oleh Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr dimana telah dijelaskan bahwa subsidi merupakan suatu bentuk pembayaran oleh pemerintah kepada perusahaan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas suatu produk dengan harga hasil produksi yang lebih murah dan membayar kepada rumah tangga konsumen agar mampu menambah jumlah barang atau jasa yang dibeli dan digunakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari 2 sumber yaitu www.bps.go.id dan <https://simreg.bappenas.go.id>. Periode waktu yang digunakan selama tiga tahun yaitu 2019-

2021. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi yakni berdasarkan pengamatan terhadap kajian literatur, buku-buku, dan jurnal – jurnal acuan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sobel test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan melalui suatu variabel mediasi secara signifikan. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Provinsi Di Indonesia yang berjumlah 38 Provinsi. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008:78), “Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampling jenuh adalah sensus.” (Putri & Nyoman, 2017), maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada.

Gambar 3.1. Kerangka Penelitian
UJI SOBEL



Hasil dan Pembahasan

Hasil dari olahdata ada beberapa outlier yang tidak digunakan yaitu Provinsi Aceh dan Maluku dikarenakan data yang tidak memenuhi prasyarat dalam pengolahan data, sehingga total data yang digunakan adalah 32 provinsi Di Indonesia. Uji variabel 32 Provinsi dinyatakan normal.

Tabel. 4.1 Uji Normalitas Tanpa Variabel Z (Kemiskinan)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0173685
	Std. Deviation	1.13214696
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.082
	Negative	-.101
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan dimediasi oleh konsumsi energi (X1 terhadap Z melalui Y)

Tabel 4.2. Uji Regresi Linier Berganda Tanpa Variabel Kemiskinan

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-28990.201	39938.668		.474
	IPM	232.760	593.165	.068	.698
	Pengangguran	3564.043	1153.579	.535	.004

a. Dependent Variable: Konsumsi Energi

Didapatkan hasil bahwa variabel IPM memiliki nilai positif namun tidak signifikan terhadap konsumsi energi. Sedangkan variabel pengangguran bernilai positif dan signifikan terhadap konsumsi energi. Ini menandakan bahwa kedua variabel mempunyai hubungan searah yaitu ketika angka pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran naik maka Akan menaikkan Konsumsi Energi di Indonesia, terutama untuk variabel Pengangguran yang memiliki hubungan signifikan terhadap Konsumsi Energi di Indonesia. Sedangkan pada variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan dimediasi oleh konsumsi energi (X1 terhadap Z melalui Y) didapatkan nilai sebagai berikut :

Tabel 4.3 Pengaruh IPM Terhadap Pengangguran Dimediasi Oleh Konsumsi Energi

X1 → Z	P1 = -3,258	SP1 = 11,997
X1 → Y	P2 = 232,760	SP2 = 593,165
Y → Z	P3 = 0,845	SP3 = 0,436

Pengaruh Tidak Langsung = P2 x P3

$$= 232,760 \times 0,845$$

$$= 196,6822$$

$$= 196,682$$

Hasil Perhitungan melalui uji sobel

$$Sp2p3 = \sqrt{P3^2 SP2^2 + P2^2 SP3^2 + SP2^2 SP3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,845)^2 (593,165)^2 + (232,760)^2 (0,436)^2 + (593,165)^2 (0,436)^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,714025 \times 351.844,71725) + (54.177,2176 \times 0,190096) + (351.844,71725 \times 0,190096)}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{251.225,92423443 + 10.298,872356889 + 66.884,273370356}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{328.409,06996167}$$

$$Sp2p3 = 573,070$$

Berdasarkan hasil uji sobel tersebut, maka dapat dihitung nilai t hitung menggunakan penghitungan uji statistik t berikut.

$$t = \frac{p2p3}{sp2p3} = \frac{196,682}{573,070} = 0,343$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan dimediasi oleh konsumsi energi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penghitungan t hitung sebesar 0,343 dan kurang dari t tabel sebesar 1.69726 ($0,343 < 1,69726$) sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Hubungan Pengangguran terhadap kemiskinan dimediasi oleh konsumsi energi (X2 terhadap Z melalui Y)

Tabel 4.4. Uji Regresi Linier Berganda Dengan Variabel Kemiskinan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.570	49.330		.478	.637
IPM	-3.258	11.997	-.053	-.272	.788
Pengangguran	-5.508	1.922	-.578	-2.866	.008
Konsumsi Energi	.845	.436	.387	1.938	.063

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Didapatkan hasil bahwa variabel IPM memiliki nilai negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan melalui variabel mediasi konsumsi energi, demikian juga dengan variabel pengangguran melalui mediasi konsumsi energi bernilai negatif namun signifikan terhadap variabel kemiskinan di Indonesia. Demikian juga dengan variabel konsumsi Energi bernilai positif namun tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan di Indonesia.

Tabel 4.5 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dimediasi Konsumsi Energi

X2 → Z	P1 = -5.508	SP1 = 1.922
X2 → Y	P2 = 3.564,043	SP2 = 1.153,579
Y → Z	P3 = 0,845	SP3 = 0,436

Pengaruh Tidak Langsung = P2 x P3

$$= 3.564,043 \times 0,845$$

$$= 3.011,616335$$

$$= 3.011,616$$

Hasil Perhitungan uji sobel

$$Sp2p3 = \sqrt{P3^2Sp2^2 + P2^2SP3^2 + SP2^2SP3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,845)^2(1.153,579)^2 + (3.564,043)^2(0,436)^2 + (1.153,579)^2(0,436)^2}$$

$$Sp2p3 =$$

$$\sqrt{(0,714025 \times 1.330.774,509241) + (12.702.402,505849 \times 0,190096) + (1.330.774,509241 \times 0,190096)}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{950.206,26896080 + 2.414.675,9067518 + 252.974,91110867}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{3.617.857,0868212}$$

$$Sp2p3 = 1.902,066$$

Berdasarkan hasil uji sobel tersebut, maka dapat dihitung nilai t hitung menggunakan penghitungan uji statistik t berikut.

$$t = \frac{p2p3}{sp2p3} = \frac{3.011,616}{1.902,066} = 1,583$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pengangguran terhadap kemiskinan dimediasi oleh konsumsi energi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penghitungan t hitung sebesar 1,583 dan kurang dari t tabel sebesar 1.69726 ($01,583 < 1,69726$) sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Kesimpulan dan implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil regresi tanpa variabel kemiskinan menunjukkan variabel IPM memiliki nilai positif namun tidak signifikan terhadap konsumsi energi. Sedangkan variabel pengangguran bernilai positif dan signifikan terhadap konsumsi energi. Ini menandakan bahwa kedua variabel mempunyai hubungan searah yaitu ketika angka pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran naik maka akan menaikkan Konsumsi Energi di Indonesia, terutama untuk variabel Pengangguran yang memiliki hubungan signifikan terhadap Konsumsi Energi di Indonesia. Hasil regresi dengan variabel kemiskinan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017) (Xia, Murshed, Khan, Chen, & Ferraz, 2022) (Deressa & M.K, 2015) memiliki nilai negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan melalui variabel mediasi konsumsi energi, demikian juga dengan variabel pengangguran melalui mediasi konsumsi energi bernilai negatif namun signifikan terhadap variabel kemiskinan di Indonesia. Demikian juga dengan variabel konsumsi Energi bernilai positif namun tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan di Indonesia.

Hasil uji mediasi dengan uji sobel menemukan bahwa tidak ada efek mediasi dari konsumsi listrik di hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran. Artinya konsumsi listrik kurang mampu menjembatani Indeks Pertumbuhan Manusia dan Pengangguran di Indonesia di karenakan di Negara berkembang berbeda dengan di Negara maju bahwa konsumsi energy lebih pada penggunaan untuk industry besar sehingga saat industry besar maju ada harapan untuk menambah jumlah tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (lewaheerilla, 2021) dan (Xia, Murshed, Khan, Chen, & Ferraz, 2022).

Temuan memiliki implikasi teoritis tentang hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, konsumsi energi dan kawasan pertumbuhan ekonomi yang lebih mungkin untuk menarik domestik dan penanaman modal asing di suatu daerah. Pemerintah dapat melihat zona pertumbuhan ekonomi berdasarkan provinsi dan dapat menginstalasi energy agar tidak hanya di konsumsi olah masyarakat namun dapat digunakan untuk industry-industri agar berkembang sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran di Indonesia.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ini studi tidak menganalisis secara mendalam secara longitudinal mengenai hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Konsumsi Energi dan Kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini hanya mengkaji 3 Tahun yaitu 2019-2021 . Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaharui analisis dengan menambahkan jangka waktu yang lebih lama dalam memeriksa peran Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dalam pekerjaan dan industrialisasi. Selanjutnya penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguraikan secara empiris hubungan modal rumah tangga untuk pembentukan elektrifikasi untuk sektor industri.

Daftar Pustaka

- Abrar, M., Sufirmansyah, Feriyanti, Firman , & Iskandar, I. (2022). Pengaruh IPM ,Inflasi,Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* , 13(1), 37-46.
- agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk ,Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARSSALAM*, 4(2), 262-282.
- Astid, E., & Soekapjo, S. (2020). Pengaruh Inflasi,Jumlah Penduduk,IPM,PMA,dan PMDN Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *FORUM EKONOMI*, 22(2), 319-325.

- Br Sembiring, I. P., & Simanjuntak, S. (2021). Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2006-2020. *Junal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi & Bisnis*, 2(2), 1-12.
- Deressa, T. K., & M.K, S. (2015). Determinant of Poverty in Ethiopia. *Ethiopian Economics Association*, 1-18. doi:DOI: 10.22004/ag.econ.259390
- Dharmmayukti, B., Rostinsulu, T. O., & Niode, A. O. (2021). ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MANADO TAHUN 2004-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(5), 98-105.
- Drs.Syahrum,M.Pd, & Drs.Salim,M.Pd. (2012). *Metodologi Penelitian kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Izzah, C. I., & Hendarti, I. M. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja ,Tingkat Upah dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 99-106.
- Kasim, R., Engka, D. S., & Siwu, H. D. (2021). ANALISIS PENGARUH INFLASI, PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTA TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA MANADO. *Jurnal EMBA*, 9(1), 953-963.
- Iewaherilla, E. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19. *Musamus Journal of Economics Development (MJED)*, 3(2), 57-63.
- Mahmudin. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah. *Journals Of conomics And Bussines Studies*, 5(2), 110-124.
- Padambo, M. R., Kawung, G. M., & Rompas , W. F. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(5), 15-27.
- Putri, C. C., & Nyoman, I. B. (2017). Pengaruh Desain Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Kepuasan Pembelian Laptop ASUS. *JURNAL MANAJEMEN DEWANTARA*, 1(1), 110-122.
- Xia, W., Murshed, M., Khan, Z., Chen, Z., & Ferraz, D. (2022). Exploring the nexus between fiscal decentralization and energy poverty for China: Does country risk matter for energy poverty reduction? *Energy*, 1-19. doi:<https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124541>
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*.